



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN , GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penetapan batas jumlah
pengisian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan,
Ganti Uang persediaan dan Tambahan Uang persediaan
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Jajaran Pemerintah
Kota Magelang tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN , GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran anjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
19. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

BAB II

PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang didasarkan pada DPA yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa DPA , DPAL dan DPPA.

Pasal 3

- (1) Besarnya batas jumlah Pengisian Uang Persediaan dan Ganti Uang ditetapkan sebesar 1/12 (satuperduabelas) dari pengeluaran belanja masing-masing SKPD di luar pengeluaran belanja yang bersifat Langsung sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengisian Uang Persediaan diajukan dengan SPM-UP dirinci sampai dengan Jenis Belanja .
- (3) Pengisian kembali Uang Persediaan dengan Ganti Uang diajukan dengan SPM-GU dirinci sampai dengan Jenis Belanja Langsung dan dilampiri dengan Jenis Kegiatan sampai dengan rincian obyek belanja yang telah membebani anggaran.

Pasal 4

Besarnya batas jumlah Pengisian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengeluaran yang mendesak untuk Belanja Tidak Langsung Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam Pengisian Uang Persediaan dan Ganti Uang dapat diberikan melebihi batas jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan paling tinggi 3/12 (tiga per duabelas) dari pengeluaran belanja.

Pasal 6

- (1) Batas jumlah pengisian Tambahan Uang dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan besarnya jumlah pengajuan Tambahan Uang, rincian kebutuhan dana dan waktu penggunaan.
- (2) Batas jumlah pengisian Tambahan Uang diajukan dengan SPM-TU dirinci sampai dengan Rincian Obyek Belanja.

Pasal 7

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang diberikan paling banyak sebesar pagu anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan Belanja Langsung.

BAB III

PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAH UANG

Pasal 8

- (1) Pengajuan permintaan pembayaran berupa Dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dalam rangka pengisian uang, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan menerbitkan SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU
- (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-UP, SPM-GU dan SPM TU kepada PPKD selaku BUD sebagai dasar penerbitan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU.

Pasal 9

- (1) SPM-UP sebagai uang muka kerja awal tidak dapat dilakukan untuk pembayaran Langsung
- (2) Pengisian kembali Uang Persediaan untuk tahap berikutnya diajukan melalui penerbitan SPM-GU setelah Uang Persediaan awal yang diterbitkan dengan SP2D-UP dipertanggungjawabkan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 10

- (1) SPM-TU hanya dapat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran secara Langsung dan Uang Persediaan.
- (2) Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan SP2D , maka sisa Tambahan Uang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan , Ganti Uang dan Tambahan Uang kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 April 2012





WALIKOTA MAGELANG,







SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Gag	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. DD	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SPP UP, GU DAN TU BAGI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	NAMA SKPD	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA YANG BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) / PENGISIAN KEMBALI	Keterangan
1	2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
1	Dinas Pendidikan	200,556,312,000	195,465,660,000	5,090,652,000	424,221,000	424,221,000	
2	Dinas Kesehatan	29,445,644,000	24,742,664,000	4,702,980,000	391,915,000	391,915,000	
3	Rumah Sakit Umum Tidar	66,221,233,000	66,221,233,000	-	-	-	
4	Dinas Pekerjaan Umum	87,981,967,000	83,546,767,000	4,435,200,000	369,600,000	369,600,000	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,627,899,000	3,459,627,000	1,168,272,000	97,356,000	97,356,000	
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7,509,794,000	6,499,922,000	1,009,872,000	84,156,000	84,156,000	
7	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	18,637,938,000	17,421,756,000	1,216,182,000	101,348,500	101,348,500	
8	Kantor Lingkungan Hidup	2,573,334,000	2,082,354,000	490,980,000	40,915,000	40,915,000	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,469,071,000	2,623,071,000	846,000,000	70,500,000	70,500,000	
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	4,912,727,000	2,776,727,000	2,136,000,000	178,000,000	178,000,000	
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	5,865,065,000	2,819,645,000	3,045,420,000	253,785,000	253,785,000	
12	Kantor Penanaman Modal	1,392,094,000	856,738,000	535,356,000	44,613,000	44,613,000	
13	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	5,105,749,000	2,235,493,000	2,870,256,000	239,188,000	239,188,000	
14	Satuan Polisi Pamong Praja	3,405,212,000	2,661,332,000	743,880,000	61,990,000	61,990,000	
15	Badan Kesbangpolimas	2,863,924,000	2,097,724,000	766,200,000	63,850,000	63,850,000	
16	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,383,613,000	4,383,613,000	-	-	-	
17	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	580,707,000	180,707,000	400,000,000	100,000,000	100,000,000	Plafon UP 3/12

NO	NAMA SKPD	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA YANG BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIaan UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIaan (UP) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIaan (GU) / PENGISIAN KEMBALI	Keterangan
1	2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
18	Sekretariat Daerah	1,664,546,000	1,151,846,000	512,700,000	42,725,000	42,725,000	
	- Bagian Tata Pemerintahan	552,643,000	304,459,000	248,184,000	20,682,000	20,682,000	
	- Bagian Organisasi	957,818,000	652,022,000	305,796,000	25,483,000	25,483,000	
	- Bagian Hukum	953,500,000	332,728,000	620,772,000	51,731,000	51,731,000	
	- Bagian Kesra	746,228,000	553,100,000	193,128,000	16,094,000	16,094,000	
	- Bagian Pembangunan	833,651,000	537,803,000	295,848,000	24,654,000	24,654,000	
	- Bagian Perekonomian	1,341,273,000	92,361,000	1,248,912,000	104,076,000	104,076,000	
	- Bagian Humas	6,810,882,000	5,860,434,000	950,448,000	79,204,000	79,204,000	
	- Bagian Perlengkapan	14,665,472,000	10,707,500,000	3,957,972,000	329,831,000	329,831,000	
	- Bagian Umum	10,808,565,000	8,525,301,000	2,283,264,000	190,272,000	190,272,000	
19	Sekretariat DPRD	1,852,685,000	1,432,685,000	420,000,000	35,000,000	35,000,000	
20	Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik	1,462,275,000	1,044,783,000	417,492,000	34,791,000	34,791,000	
21	Kecamatan Magelang Utara	1,828,738,000	1,572,514,000	256,224,000	21,352,000	21,352,000	
22	Kecamatan Magelang Selatan	1,720,642,000	1,268,242,000	452,400,000	37,700,000	37,700,000	
23	Kecamatan Magelang Tengah	1,180,729,000	705,049,000	475,680,000	39,640,000	39,640,000	
24	Kelurahan Rejowinangun Utara	1,240,148,000	966,368,000	273,780,000	22,815,000	22,815,000	
25	Kelurahan Magersari	1,036,264,000	824,512,000	211,752,000	17,646,000	17,646,000	
26	Kelurahan Jurangombo Utara	1,174,380,000	861,408,000	312,972,000	26,081,000	26,081,000	
27	Kelurahan Jurangombo Selatan	1,164,308,000	962,504,000	201,804,000	16,817,000	16,817,000	
28	Kelurahan Tidar Utara	1,070,291,000	928,631,000	141,660,000	11,805,000	11,805,000	
29	Kelurahan Tidar Selatan	1,157,191,000	795,667,000	361,524,000	30,127,000	30,127,000	
30	Kelurahan Wates	1,179,057,000	957,057,000	222,000,000	18,500,000	18,500,000	
31	Kelurahan Potrobangsari	1,177,662,000	877,350,000	300,312,000	25,026,000	25,026,000	
32	Kelurahan Kedungsari	989,601,000	712,989,000	276,612,000	23,051,000	23,051,000	
33	Kelurahan Kramat Utara						

NO	NAMA SKPD	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA YANG BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) / PENGISIAN KEMBALI	Keterangan
1	2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
34	Kelurahan Kramat Selatan	1,160,177,000	799,253,000	360,924,000	30,077,000	30,077,000	
35	Kelurahanh Kemirejo	1,044,156,000	823,356,000	220,800,000	18,400,000	18,400,000	
36	Kelurahan Cacaban	1,283,910,000	756,666,000	527,244,000	43,937,000	43,937,000	
37	Kelurahan Rejowinangun Utara	1,225,469,000	218,669,000	1,006,800,000	83,900,000	83,900,000	
38	Kelurahan Magelang	1,145,457,000	893,757,000	251,700,000	20,975,000	20,975,000	
39	Kelurahan Panjang	1,064,658,000	618,522,000	446,136,000	37,178,000	37,178,000	
40	Kelurahan Gelangan	1,156,896,000	850,944,000	305,952,000	25,496,000	25,496,000	
41	Inspektorat	2,963,406,000	1,947,786,000	1,015,620,000	84,635,000	84,635,000	
42	Badan Kepegawaian Daerah	9,133,681,000	6,715,681,000	2,418,000,000	201,500,000	201,500,000	
43	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	1,824,360,000	1,527,204,000	297,156,000	24,763,000	24,763,000	
44	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	21,025,158,000	17,818,566,000	3,206,592,000	267,216,000	267,216,000	
45	Dinas Pengelolaan Pasar	5,357,430,000	4,361,430,000	996,000,000	83,000,000	83,000,000	
46	BPMPKB	6,542,922,000	2,968,062,000	3,574,860,000	297,905,000	297,905,000	
47	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1,922,457,000	1,551,945,000	370,512,000	30,876,000	30,876,000	
48	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	5,875,116,000	4,648,320,000	1,226,796,000	102,233,000	102,233,000	
	J U M L A H	569,826,085,000	509,202,507,000	60,623,578,000	5,118,631,500	5,118,631,500	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

